



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

**Judul** : Wiranto Minta Tambahan Rp 60 M: Pertahankan Papua, Tambah Dana Diplomasi  
**Tanggal** : Kamis, 06 September 2018  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Wiranto Minta Tambahan Rp 60 M Pertahankan Papua, Tambah Dana Diplomasi

PEMERINTAH meminta DPR menyelamatkan Papua. Sebab, tujuh dari 13 negara di kawasan Samudra Pasifik berniat memisahkan Bumi Cenderawasih dari Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, diperlukan diplomasi yang tepat untuk mempertahankan Papua dari gangguan negara tetangga. Hal itulah yang melatarbelakangi Wiranto meminta tambahan anggaran Rp 60 miliar saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemarin.

"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp 60 miliar. Anggaran ini untuk melakukan soft diplomasi untuk Papua," ujarnya.

Wiranto mengatakan, anggaran sebesar Rp 60 miliar itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Tambahan anggaran yang diajukan tersebut di luar pagu anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2018 Rp 281,4 miliar.

"Secara intens kami melakukan soft diplomacy. Saya memimpin sendiri, datang ke sana, koordinasi, ngomong sama mereka. Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk tambahan itu," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, tujuh dari 13 negara di kawasan Pasifik Selatan mendukung kemerdekaan Papua. Negara-negara di Pasifik Selatan juga banyak menerima informasi yang keliru tentang sikap Indonesia terhadap Papua. Misalnya, anggapan pemerintah telah menganaktirikan pembangunan Papua.

Karena itu, pemerintah harus lebih gencar melakukan diplomasi terhadap negara-negara tersebut.

"Ternyata di Pasifik Selatan ada 13 negara dan masing-masing punya pengaruh di PBB. Tujuh negara mendukung kemerdekaan Papua," ungkapnya.

Bukan hanya negara di Pasifik Selatan, ada juga aktivis anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang "menjual" kemerdekaan Papua di Eropa. Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

"Para aktivis yang anti NKRI membuat opini yang salah, jualan di Eropa, baru masuk ke Pasifik Selatan. Misalnya pembangunan Papua itu dianaktirikan, pemerintah cuma memusatkan pembangunan di pulau lain," kata Wiranto.

Namun begitu, bekas Panglima ABRI itu mengklaim telah melakukan diplomasi terhadap dua kepala negara di Pasifik Selatan, yakni Nauru dan Vanuatu. Kedua kepala negara itu diajak langsung ke Papua untuk melihat perkembangan pembangunan di sana.

"Selama ini kita lupa, kita alpa, bahwa ada negara-negara banyak di sana yang nanti bisa membahayakan dominasi kita, Papua menjadi bagian dari wilayah kita dan ternyata betul," kata Wiranto.

Anggaran sebesar Rp 60 miliar yang diajukan Wiranto itu terbagi dalam lima pos kegiatan koordinasi: peningkatan citra Papua Rp 20 miliar, peningkatan kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan Rp 15 miliar, peningkatan kerja sama organisasi internasional Pasifik Selatan Rp 15 miliar.

Selanjutnya, pengelolaan keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan Rp 5 miliar dan peningkatan kerja sama intelijen keamanan wilayah perbatasan wilayah Australia dan Pasifik Selatan Rp 5 miliar. ■ DIR